



RINGKASAN

SEPTIAN ROMLAH. Sistem Pertanggung Jawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan . Accountability System of Business Trip Position Cost at Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO.

Pemerintah baik daerah maupun pusat memiliki berbagai kegiatan setiap tahunnya, tidak terkecuali Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perjalanan Dinas Jabatan , Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengatur kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan..

Tujuan laporan tugas akhir ini diantaranya adalah Menerangkan kebijakan-kebijakan perjalanan dinas jabatan, Menguraikan fungsi yang terkait perjalanan dinas jabatan, Menerangkan dokumen yang terkait perjalanan dinas jabatan, Menguraikan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan-LS, Menguraikan pertanggung jawaban perjalanan dinas jabatan –LS, dan Menerangkan pengendalian internal perjalanan dinas jabatan. Praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 8 minggu dimulai dari 20 Januari-16 Maret 2020 di Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan. Data yang diperlukan dalam laporan tugas akhir ini diperoleh dengan beberapa metode diantaranya, observasi pada bagian-bagian terkait, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dokumentasi data terkait yang mendukung dan studi pustaka.

Pembayaran biaya perjalanan dinas di Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan oleh pihak terakit yaitu pelaksana SPD, bagian kepegawaian, pengadministrasi keuangan, pejabat pembuat komitmen, operator spp, operator spm, dan bendahara pengeluaran. Dokumen yang digunakan dalam sistem pembayaran biaya dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas jabatan ls yaitu daftar nominatif, surat tugas, surat perjalanan dinas, daftar rincian biaya, daftar pengeluaran riil, surat permintaan pembayaran(SPP), surat perintah membayar(SPM), dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem pembayaran biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan SOP yang baik dalam proses pembayaran biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan yang dilakukan.

Kata Kunci : Perjalanan Dinas Jabatan, Sistem Pertanggungjawaban